

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kebijakan luar negeri kontraterorisme Jerman mengalami perubahan pada tahun 2016-2021 secara bertahap. Perubahan ini disebabkan oleh adanya krisis terorisme yang terjadi melalui kebijakan yang disahkan oleh Angela Merkel, yaitu *Open Door Policy*. Dalam proses perubahan kebijakan luar negeri kontraterorisme Jerman, terdapat pengaruh yang disebabkan oleh sumber-sumber perubahan. Sumber-sumber perubahan tersebut terdiri atas sumber domestik dan sumber internasional.

Sumber domestik yang pertama adalah birokrasi. Hal ini dilihat dari Intelijen Domestik Jerman yaitu BfV (*Bundesamt für Verfassungsschutz*) dan Kepolisian Federal Jerman atau *Bundeskriminalamt*, yang mengalami kegagalan dalam mencegah terjadinya terorisme sehingga membutuhkan perubahan dalam pencegahan terorisme. Lalu, yang kedua adalah opini publik. Pada saat krisis terorisme terjadi di Jerman, masyarakat Jerman khawatir dengan keamanan di Jerman yang diakibatkan oleh para imigran yang telah disusupi oleh IS serta tidak puas dengan tindakan pemerintah dalam hal terorisme. Kemudian adalah media. Pada saat krisis terorisme terjadi, media menggunakan kesempatan untuk meliput berita-berita mengenai aksi terorisme sehingga dengan gaya tulisan untuk membentuk opini publik mengenai kegagalan pemerintah Jerman dalam menangani

terorisme. Lalu yang keempat adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan seperti PEGIDA yang merupakan kelompok anti-migran muncul di Jerman untuk memprotes kebijakan Merkel terkait imigran yang menjadi kesempatan IS untuk menyebar teror di Jerman. Lalu kelompok kepentingan lainnya yang cenderung lebih tenang dalam menyampaikan keresahannya adalah Serikat Polisi Jerman (DpolG). Kelompok DpolG menyampaikan bentuk keresahannya melalui pemimpinnya yaitu Reinier Wendt. Wendt menyampaikan gagasan-gagasan dalam mengatasi krisis terorisme yang terjadi di Jerman melalui media. Dalam hal penyampaian keresahannya, kedua kelompok ini cenderung memiliki cara berbeda. PEGIDA melakukannya melalui aksi demo yang dilakukan tiap minggu bahkan melalui kekerasan sedangkan DpolG cenderung lebih tenang dan lebih diplomatis. Lalu yang terakhir adalah partai politik. Dalam hal ini, partai politik yang memiliki pengaruh besar adalah AfD (*Alternative Party for Germany*) yang merupakan partai sayap kanan di Jerman. Partai ini terang-terangan menentang imigran dan anti-islam karena dianggap sebagai ancaman teroris di Jerman. Partai AfD juga mendapat keuntungan dengan aksi-aksinya di Jerman yang membuat AfD mendapat banyak dukungan dalam pemilihan umum federal di Jerman.

Selanjutnya adalah sumber-sumber perubahan internasional yang ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri kontraterorisme Jerman. Yang pertama adalah faktor global. Adanya krisis timur tengah yang terjadi di Irak diakibatkan oleh IS membuat Jerman bersama negara lain untuk

bergabung dalam koalisi Anti-ISIS untuk membantu Irak dalam melawan ISIS. Lalu yang kedua adalah faktor regional. Jerman membentuk kerjasama dengan organisasi regional terdekat yaitu NATO dan Uni Eropa. Kerjasama ini dibuat untuk mendeteksi adanya ancaman terorisme yang masuk ke dalam negara anggota NATO dan Uni Eropa, melalui teknologi serta pertukaran informasi bersama para intelijen setiap negara. Lalu yang ketiga adalah hubungan bilateral. Jerman bergabung dengan koalisi Anti-ISIS karena permohonan Prancis yang baru saja mendapat serangan terorisme di Paris. Karena hubungan bilateral yang dekat, Jerman akhirnya memutuskan bergabung dengan koalisi Anti-ISIS sebagai bentuk hubungan yang dekat dengan Prancis. Lalu di tahun 2019 melalui *Treaty of Aachen 2019*, hubungan bilateral Jerman dan Prancis diperkuat khususnya dalam hal terorisme untuk saling bekerjasama. Lalu yang terakhir adalah aktor non-negara. Dalam hal ini yang menjadi aktor non-negara adalah ISIS. Kelompok IS menjadi ancaman bagi Jerman setelah kebijakan *Open Door Policy* karena IS menggunakan kesempatan ini untuk menyusup di antara para pengungsi untuk menyebar teror dan menggoyang Pemerintah Jerman.

Setelah itu, para pengambil keputusan melihat adanya krisis terorisme yang terjadi menjadi sebuah jendela peluang yang didasarkan pada persepsinya. Persepsi yang ada didasarkan pada beberapa hal seperti, keyakinan Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel bahwa Jerman mampu melewati krisis terorisme yang terjadi. Lalu, terdapat tindakan yang

didasarkan atas motif, seperti usaha Merkel agar partai koalisi yang dimiliki Merkel tetap eksis di pemerintahan dan di mata masyarakat Jerman. Selanjutnya, didasarkan pada gaya kepemimpinan Angela Merkel yang cenderung manipulatif, di mana saat krisis terjadi Merkel selalu mengatakan bahwa Jerman adalah negara yang kuat dan mampu menghadapi terorisme untuk membuat warga Jerman tidak melakukan demo yang berkelanjutan. Selanjutnya, didasarkan pada pengalaman dan minat pada urusan luar negeri yang dimiliki oleh Merkel.

Kemudian, dengan memperhatikan kondisi struktural yang terjadi di Jerman. Adanya krisis terorisme yang terjadi di Jerman setelah disahkannya kebijakan *Open Door Policy* telah menyebabkan perubahan kondisi struktural yang ada di Jerman yang diakibatkan oleh teror kelompok ISIS untuk menyebarkan ketakutan dan menggoyang pemerintahan Jerman. Dengan hal itu, Jerman ingin memperkuat kebijakan keamanan terhadap serangan terorisme melalui dokumen *Weissbuch 2016*. Oleh karena itu, Jerman secara bertahap memperkuat keamanan dan sekaligus berbenah dalam hal pencegahan terorisme baik misi dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri kontraterorisme Jerman pada tahun 2016-2021 telah terbukti disebabkan oleh sumber-sumber domestik dan internasional yang diperkuat dengan dimanfaatkannya jendela peluang pada saat momentum disahkannya *Open Door Policy* yang berujung pada krisis terorisme.

## **4.2 Saran**

Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri kontraterorisme Jerman dalam kurun waktu 2016–2021 melalui pendekatan teori Window of Opportunity yang menekankan pada dinamika aktor, persepsi, dan peluang waktu yang dimanfaatkan oleh pemimpin. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup analisis, baik secara temporal maupun tematik. Secara temporal, penelitian lanjutan dapat mengkaji kelanjutan implementasi Weißbuch 2016 setelah tahun 2021, terutama dalam konteks meningkatnya ancaman siber dan ekstremisme sayap kanan di Jerman. Selain itu, pendekatan tematik dapat diperluas dengan membandingkan kebijakan kontraterorisme Jerman dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis atau Belanda, untuk meninjau bagaimana konteks domestik dan tekanan internasional mempengaruhi formulasi kebijakan masing-masing negara. Penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi aspek kebijakan pencegahan dan deradikalisasi dalam kebijakan luar negeri Jerman sebagai respon non-militer terhadap terorisme, yang belum menjadi fokus utama dalam kajian ini.